

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Organisasi : **Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat**
2. Tugas : Memimpin, menyelenggarakan, mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan di bidang perhubungan yang merupakan urusan pemerintahan provinsi, tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
3. Fungsi :
1. Menetapkan rumusan kebijakan strategis di sektor transportasi terkait lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran sesuai kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan dari Pemerintah Pusat
  2. Menetapkan rumusan kebijakan transportasi untuk mewujudkan NTB terkoneksi sesuai target RPJMD
  3. Menetapkan rumusan kebijakan pengembangan SDM perhubungan
  4. Menetapkan rencana dan pelaksanaan program transportasi terkait lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran sesuai kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan dari Pemerintah Pusat
  5. Menetapkan dan menyelenggarakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  6. Menetapkan dan menyelenggarakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
  7. Menetapkan dan menyelenggarakan Program Pengelolaan Pelayaran
  8. Menetapkan rencana dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran sesuai kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan dari pemerintah pusat.
  9. Menetapkan laporan pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTB.
  10. Melaksanakan koordinasi dan integrasi program/kegiatan dengan para pihak (mitra kerja di sektor transportasi)
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1.	Meningkatnya Konektivitas Layanan Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Rute Angkutan Darat</li> <li>2. Persentase Rute Angkutan Laut</li> </ol>	<p>Jumlah rute existing angkutan darat ditambah jumlah rute rencana angkutan darat dibagi Jumlah rute kebutuhan angkutan darat yang ada dikali 100 persentase.</p> <p>Catatan : Rute/ trayek angkutan darat adalah merupakan titik yang menghubungkan/ terkoneksi nya jalur titik A menuju titik B. Rute yang dibutuhkan merupakan jumlah titik rute existing ditambah dengan titik rute yang di rencanakan sampai dengan Tahun 2023</p> <p>Jumlah rute existing angkutan laut ditambah jumlah rute rencana angkutan laut dibagi Jumlah rute kebutuhan angkutan laut yang ada dikali 100 persentase</p> <p>Catatan : rute/ trayek angkutan laut adalah merupakan titik yang menghubungkan/ terkoneksi nya jalur titik A menuju titik B. Rute yang dibutuhkan merupakan jumlah titik rute existing ditambah dengan titik rute yang di rencanakan sampai dengan Tahun 2023</p>
2.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	1. Rasio Fatalitas	<p>Jumlah Korban Meninggal Dunia akibat Kecelakaan transportasi di NTB Tahun N dibagi Jumlah Kendaraan bermotor Tahun N dikali 10.000</p> <p>Catatan : Jumlah Kendaraan bermotor yang ada di NTB</p>

Mataram, 2021  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**H. LALU MOH FAOZAL, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 19661231 198608 1 007